



Studi Literatur Terhadap Kebijakan Investasi Berbasis Lingkungan Hidup pada Pembangunan Kota Surabaya

Elfayasa Prikafais¹, Gideon Verrel Sinardi²

^{1,2}Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

¹6032221044@mhs.its.ac.id, ²6032221068@mhs.its.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 15 Oktober 2022

Disetujui 20 November 2022

Diterbitkan 25 Desember 2022

Kata kunci:

Investasi; Lingkungan hidup;
Pembangunan; Ruang publik;
Sustainable development goals

Keywords :

*Investment; Environment;
Development; Public area;
Sustainable development goals*

ABSTRAK

Kebijakan pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang semakin besar di Kota Surabaya. Pembangunan yang diharapkan dapat mendukung aktivitas sosial, budaya serta perekonomian haruslah sejalan dengan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk memahami pemerintah federal, pemerintah daerah, dan pemegang kepentingan lainnya terlibat dalam mengembangkan strategi investasi untuk menjadikan Surabaya kota yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur serta pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil dari Penelitian ini yaitu sebagai kota yang mengalami urbanisasi, Surabaya sadar akan nilai pembangunan berkelanjutan. Melalui GPSP, Pemerintah Daerah Surabaya bekerja sama dengan UCLG-ASPAC untuk memecahkan masalah urbanisasi. Banyak pengambil kebijakan dari tingkat daerah, nasional, dan internasional terlibat dalam GPSP yang dimulai pada 2016. Proyek ini mengimplementasikan tiga metode dalam pelaksanaannya: partisipasi berbagai *stakeholder* dalam desain dan pengembangan; pemanfaatan informasi baru; serta pelaksanaan pengembangan proyek sebagai percontohan. Dalam inisiatif ini, Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran dan posisi yang signifikan. Sebuah kota yang berkelanjutan harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk pemerintah, ekosistem sosial politik, dan lingkungan.

ABSTRACT

Sustainable development policies are a growing challenge in the city of Surabaya. Development that is expected to support social, cultural, and economic activities must be in line with sustainable development as determined by the government. The purpose of this research is to understand the role of the federal government, local government, and other stakeholders in developing investment strategies to make Surabaya a sustainable city. This study uses a literature study method and a descriptive-qualitative approach. The results of this study show that, as a city experiencing urbanization, Surabaya is aware of the value of sustainable development. Through GPSP, the regional government of Surabaya is working with UCLG-ASPAC to solve urbanization problems. Many policymakers from regional, national, and international levels were involved in the GPSP, which started in 2016. The project implemented three methods in its implementation: multi-stakeholder participation in design and development; utilization of new information; and implementation of project development as a pilot. In this initiative, the Surabaya City Government has a significant role and position. A sustainable city must consider a number of factors, including government, the socio-political ecosystem, and the environment.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, saat ini Indonesia bergabung dengan 192 negara lain dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* sebagai program pembangunan berkelanjutan (Peraturan Presiden, 2017). Dimana Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan seringkali juga menjadi semacam ideology of developmentalism (Rozikin, 2012). Pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait dengan isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan isu lain yang lebih luas. Pada saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tetap menjadi prinsip pembangunan terbaik yang sering digunakan (Obot & Setyawan, 2019). SDGs adalah program global jangka panjang untuk memanfaatkan semua sumber daya dan potensi yang dimiliki setiap negara (Irhamy, 2019). SDGs adalah agenda bersama yang mempunyai tujuan dalam mencapai perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat pada masa

sekarang dan masa depan. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang mempunyai capaian yang lebih beragam dan komprehensif. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)
(Sumber: sdg2030indonesia.org)

Mewujudkan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai tujuan SDGs kesebelas. Dengan urbanisasi besar-besaran yang terjadi, tujuan ini memposisikan kota sebagai pusat pembangunan berkelanjutan (uclg.org 2019 didalam (Trifita & Amaliyah, 2020)). Konsep pembangunan berkelanjutan harus memperhitungkan biaya tambahan dari angka keuntungan dan kerugian yang ditanggung oleh masyarakat jika lingkungan dirugikan. Terdapat tiga esensi dari pembangunan berkelanjutan: (A) lingkungan yang berkelanjutan, (B) kehidupan sosial yang berkelanjutan, dan (C) kondisi ekonomi yang berkelanjutan. Kelestarian lingkungan mengacu pada menjaga kualitas lingkungan untuk aktivitas manusia yang berkelanjutan. Mempertahankan hak asasi manusia, kesetaraan, identitas budaya, dan toleransi terhadap keragaman semuanya diperlukan untuk keberlanjutan sosial. Mempertahankan sumber daya alam, sosial, dan manusia yang esensial sebagai norma hukum adalah penting untuk ekonomi yang berkelanjutan. Menghadapi permasalahan pembangunan lingkungan hidup yang begitu kompleks, akibat perubahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat maupun pembangunan akan menguras sumberdaya alam, sehingga daya dukung lingkungan menjadi menurun, maka pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana turut memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Sugiartha & Widiati, 2020).

Pembangunan dan lingkungan memiliki hubungan yang saling berkaitan, timbal balik dan memiliki interaksi yang sangat erat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pembangunan dapat mempengaruhi lingkungan dan lingkungan pun dapat mempengaruhi pembangunan (Zaini & Darmawanto, 2015). Pembangunan dalam suatu negara adalah hal penting dan tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya (Purba et al., 2021). Sejatinya, pembangunan merupakan proses perubahan menuju sesuatu yang lebih baik. Kondisi yang lebih baik dari keadaan semula menjadi tujuan dari dilaksanakannya pembangunan (Nasution, 2020). Saat ini Indonesia telah berupaya menjalankan pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat serta pemerintah kota. Kebijakan tersebut haruslah bersifat strategis untuk mendukung sosial, budaya dan perekonomian serta sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam pembuatannya, kebijakan tersebut harus mampu mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat, baik pemerintah maupun investor asing dan lokal serta masyarakat umum. Sehingga kebijakan investasi diperlukan dimana investasi merupakan penanaman modal atau dana yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu bentuk aktiva (aset). Tujuan dari investasi adalah terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut, terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham, dan turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa (Fahmi, 2014). Salah satu kota besar yang mempunyai tantangan pembangunan berkelanjutan adalah Surabaya. Kota Surabaya mampu bertumbuh melahirkan daerah *mega-urban*, yaitu wilayah kota sangat besar disertai tingkat kependudukan yang tinggi. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Transmigrasi Surabaya memperkirakan tingkat urbanisasi di Surabaya mencapai 40% pada tahun 2000 dan akan mencapai 60% pada tahun 2025 atau sekitar 160 juta jiwa (Styowati, 2013).

Surabaya menghadapi persoalan sebagai akibat dari isu urbanisasi dan berbenturan dengan banyak perspektif dari sisi kehidupan kota. Beberapa wilayah Surabaya sudah ditempati oleh bangunan tinggi sebagaimana perkantoran, perhotelan, pusat perbelanjaan, dan area pabrik. Maka dari itu, area yang perlu digunakan untuk membuat ruang publik bagi penduduk perkotaan diabaikan (Biyana Shandy, 2015). Kawasan kota Surabaya kurang seimbang dalam pembangunan, sehingga tampak panas karena ruang terbuka hijau dan ruang publik yang langka. Sementara itu, pemerintah kota kurang memperhatikan keberadaan ruang terbuka hijau. Akibatnya, populasi Surabaya menjadi kurang terhubung dan ruang publik, yang merupakan komponen penting sebuah kota, menjadi terabaikan. Keberadaan ruang publik berperan sangat penting sebab dapat menjadi tanda bahwa sebuah kota menjadi layak huni (Ravazzoli & Torricelli, 2017).

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan United Cities Local Government Asia-Pacific sebagai bagian dari upaya mewujudkan kota berkelanjutan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya serta UCLG ASPAC bekerja sama untuk memperkuat pemerintahan kota di Surabaya melalui penciptaan ruang publik. Program Ruang Publik Global (GPSP), yang inisiatif dimulai oleh UN-Habitat yang bermaksud menyediakan *public space* untuk sebuah metropolis, menjadi subyek dari kemitraan ini. Dewan Pemerintahan UN-Habitat bersama negara yang tergabung dalam PBB telah mewajibkan UN-Habitat agar memasukkan ruang publik dalam lingkup program, menghasilkan serta mempromosikan perencanaan tata kota, serta aktif mendukung beberapa kota sebagai akibat dari meningkatnya minat terhadap ruang publik, terutama setelah tahun 2011.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aldyan, 2015) menyatakan bahwa Kebijakan investasi berbasis lingkungan hidup melalui pola pembangunan di Pemerintah Kota Surakarta dilihat dari Rencana Pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kota Surakarta. Penulis dalam karya tulis ini menyimpulkan bahwa Pola pembangunan di wilayah pemerintah kota surakarta telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta, Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kota Surakarta, yang kesemuanya memuat pembangunan dan kemudahan investasi, serta pola pembangunan berbasis lingkungan melalui Komitmen kota hijau yang tidak hanya sekedar menghijaukan NRW serta model kebijakan Ekonomi barter yang di bungkus dengan kepraktisan yaitu menarik investor berinvestasi dalam pembangunan berbasis lingkungan hidup "ditukar" dengan pemberian fasilitas dan kemudahan investasi serta merekomendasikan suasana pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Investasi di daerah Pemerintah Kota Surakarta, maka model kebijakan investasi barang modal dan bangunan berkonsep barter ini dapat dijadikan masukan. Selain itu penerapan komitmen Surakarta sebagai Kota Hijau memerlukan peran serta semua pihak.

Dari uraian latar belakang, untuk lebih memahami bagaimana pemerintah federal, pemerintah daerah, dan pemegang kepentingan lainnya terlibat dalam mengembangkan strategi investasi untuk menjadikan Surabaya kota yang berkelanjutan, penelitian ini dilatarbelakangi oleh gagasan pada SDGs. Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan informasi serta solusi bagi pemerintah dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan investasi yang tepat untuk pembangunan kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur serta pendekatan deskriptif-kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2019) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, pengamatan atau observasi, dan teknik dokumentasi. Proses pengumpulan informasi tersebut didapatkan dari perpustakaan, membaca dan mencatat serta memelihara sumber penelitian semuanya terhubung dengan pendekatan studi literatur. Sebelum dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan studi pustaka setelah memilih topik penelitian dan merumuskan masalah. Adapun informasi didapatkan dari penjelasan studi kasus digabungkan dengan sumber primer dari wawancara pemangku kepentingan dan sumber sekunder termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan tahunan, dan artikel web. Metode hermeneutik digunakan dalam analisis dokumen hukum. Pendekatan ini menawarkan sarana untuk menemukan perspektif penafsir, teks yang berfungsi sebagai subjek pemahaman, dan pemahaman konteks historis dan sosiologis tertentu pada isu-isu yang berkaitan dengan geografi dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021–2026, merupakan pedoman bagi pemerintah kota dan masyarakat dalam berpartisipasi di pembangunan kota surabaya. RPJMD merupakan dokumen yang menggambarkan wilayah selama lima tahun yang telah berlalu sejak Eri Cahyadi, S.T., M.T., dan Ir. Armuji diangkat menjadi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 mencantumkan kebijakan pembangunan provinsi yang dimaksudkan untuk membantu mewujudkan visi pembangunannya, yaitu mewujudkan masyarakat yang unggul, sejahtera, adil dan bermoral beserta tata pemerintahan partisipatif yang inklusif. Hal ini mencakup strategi jangka panjang Surabaya dalam memerangi Pandemi COVID-19, khususnya kegiatan pemulihan ekonomi dan tatanan sosial pada tahun 2021–2026.

Investasi langsung (*direct investment*) dan investasi portofolio (*portofolio investment*) surat berharga merupakan bentuk yang dapat diterima dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah proyek PMDN dan PMA di Surabaya.

Tabel 1 Total Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri / Penanaman Modal Asing di Surabaya 2016 - 2020

No	Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Persetujuan					
1.1	Jumlah Proyek	43	86	293	122	665
1.2	Nilai <i>Investment</i> (Rp Miliar)	2.371,45	4.964,37	10.379,22	5.689,61	384,95
	(USD Juta)	351,62	-	774,57	379,90	-
2	Realisasi					
2.1	Jumlah Proyek	59	47	122	379	588
2.2	Nilai <i>Investment</i> (Rp Miliar)	3.797,87	5.065,56	5.690,23	19.219,90	22.152,03
	(USD Juta)	209,65	166,45	53,28	1.281,32	

(Sumber: DPM-PTSP Kota Surabaya, 2020)

Investasi modal dalam negeri dan modal asing di Kota Surabaya membawa dampak positif terhadap tingkat ketenagakerjaan di Surabaya. Dengan meningkatkan nilai investasi, PMA dan PMDN mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja baru. Penandatanganan MoU *pilot project* Global Public Space Programs oleh Pemerintah Kota Surabaya, UCLG ASPAC, UN-Habitat, dan Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya di tiga lokasi: Kampung Ketandan, Keputih, dan Tanah Kali Kedinding. Hasil wawancara yang dilakukan dengan bagian kerjasama luar negeri pemerintah Kota Surabaya, bahwa menurut Rahmasari melalui proses negosiasi, ketiga lokasi tersebut dipilih dan dipertimbangkan kebutuhan masyarakat, tujuan beserta target, dan anggaran kegiatan. Tujuan SDG ke-11 dicapai di Kota Surabaya melalui tiga proyek percobaan yang mencapai sejumlah sasaran. Dengan membangun pendekatan partisipatif di tempat-tempat umum, yang dapat segera menumbuhkan rasa saling memiliki, mempertajam keterampilan sosial, dan mengembangkan karakter positif di masyarakat, pemulihan *public space* di Desa Ketandan mewujudkan SDG 11.4. Penciptaan area publik dengan konsep “Balai Budaya” merupakan upaya melestarikan warisan alam dan budaya Surabaya. Institusi pemerintah seharusnya mampu melestarikan nilai kebudayaan di dunia saat ini, ketika banyak perilaku masyarakat telah bergeser dari yang kebanyakan individualistis menjadi sangat sosial.

Target ke-11,6 SDGs telah dipenuhi oleh penerapan lain, yang menandatangani area publik Kreatif Keputih sebagai objek taman. Sejumlah masalah, termasuk keluaran sampah yang tinggi serta peningkatan jumlah pencemaran udara dan air, disebabkan oleh pertumbuhan kota dan populasi Surabaya. Cara terbaik untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas udara di Surabaya adalah dengan mengubah lahan bekas insinerator (pemusnahan sampah) menjadi taman umum yang dikelola dengan baik. *Public space* di Kedinding diwacanakan akan mengusung tema taman kota, namun masih dalam tahap pengerjaan. Akibatnya, akan ada lebih banyak tempat umum dengan taman hiburan, yang seharusnya mengurangi pencemaran udara di Surabaya.

Selain aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dari pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah dan pusat—yang diwakili oleh Pemerintah Kota Surabaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Ditjen Cipta Karya—berperan penting dalam menilai masalah-masalah ini. Kerangka baru untuk pembangunan berkelanjutan telah berhasil disajikan oleh Pemerintah Kota Surabaya, termasuk data tentang penciptaan ruang publik yang efektif. Konsep yang menghadirkan *sustainable cities* harus dimengerti dan disosialisasikan kepada penduduk kota-kota besar seperti Surabaya, berbeda dengan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan sebelumnya yang hanya berfokus pada inisiatif untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, menjamin pendidikan, dan meningkatkan kesehatan fisik.

Green infrastructure menghadirkan investasi besar peluang global yang diperlukan dari sekarang hingga 2030. Namun, masih ada kekurangan yang dapat diidentifikasi yaitu kesiapan, pendanaan dari bank, dan pemahaman tentang pembiayaan hijau (*green finance*). Berdasarkan laporan Indonesia GIIO Report, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan sasaran kontribusi pengurangan emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 dengan dukungan keuangan internasional. Pemerintah harus memfasilitasi konsep *green management* melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengurangi level emisi dari CO₂ yang ditimbulkan dari peningkatan investasi asing (Widiastuti et al, 2020). Indonesia sudah mengembangkan *green bonds*, sebagaimana Kementerian Keuangan RI telah menerbitkan delapan obligasi hijau dan berkelanjutan.

Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Aldyan, 2015) yang menyatakan bahwa Kebijakan investasi berbasis lingkungan hidup melalui pola pembangunan di Pemerintah Kota Surakarta dilihat dari Rencana Pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kota Surakarta. Penulis dalam karya tulis ini menyimpulkan bahwa Pola pembangunan di wilayah pemerintah kota surakarta telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta, Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kota Surakarta, yang kesemuanya memuat pembangunan dan kemudahan investasi, serta pola pembangunan berbasis lingkungan melalui Komitmen kota hijau yang tidak hanya sekedar menghidjaukan NRWD serta model kebijakan Ekonomi barter yang di bungkus dengan kepraktisan yaitu menarik investor berinvestasi dalam pembangunan berbasis lingkungan hidup "ditukar" dengan pemberian fasilitas dan kemudahan investasi serta merekomendasikan suasana pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Investasi di daerah Pemerintah Kota Surakarta, maka model kebijakan investasi barang modal dan bangunan berkonsep barter ini dapat dijadikan masukan. Selain itu penerapan komitmen Surakarta sebagai Kota Hijau memerlukan peran serta semua pihak. Dimana model kebijakan investasi yang ideal dapat dilakukan dengan Konsep investasi kerakyatan melalui Ekonomi barter yang di bungkus dengan kepraktisan. Memodifikasi kebijakan Investasi berbentuk Barang Modal dan Bangunan dalam konsep barter dengan menarik investor berinvestasi dalam pembangunan berbasis lingkungan hidup ditukar dengan pemberian fasilitas dan kemudahan investasi. Pemberdayaan investasi dengan meminta, tidak hanya keuntungan uang bagi pemerintah kota ketika investor menanamkan modal di Kota Surakarta

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebagai kota yang mengalami urbanisasi, Surabaya sadar akan nilai pembangunan berkelanjutan. Melalui GPSP, Pemerintah Daerah Surabaya bekerja sama dengan UCLG-ASPAC untuk memecahkan masalah urbanisasi. Banyak pengambil kebijakan dari tingkat daerah, nasional, dan internasional terlibat dalam GPSP yang dimulai pada 2016. Proyek ini mengimplementasikan tiga metode dalam pelaksanaannya: partisipasi berbagai *stakeholder* dalam desain dan pengembangan; pemanfaatan informasi baru; serta pelaksanaan pengembangan proyek sebagai percontohan. Dalam inisiatif ini, Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran dan posisi yang signifikan. Sebuah kota yang berkelanjutan harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk pemerintah, ekosistem sosial politik, dan lingkungan. Mengingat antusiasme masyarakat kota Surabaya dalam mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan sosialisasi, pelatihan, *workshop*, sampai dengan pemanfaatan taman / ruang terbuka, partisipasi masyarakat harus diapresiasi dan dijadikan panutan. Studi ini menyarankan pengujian empiris tambahan dengan studi kasus lebih mendalam dan penggunaan metrik untuk mengukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan yang dipimpin oleh pemerintah daerah. Metode ini diperlukan sebagai inisiatif kerjasama yang melibatkan sejumlah pengambil kebijakan, dimana dapat mengurangi keseluruhan dari efektivitas kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldyan, D. S. A. (2015). Aktualisasi Kebijakan Investasi Berbasis Lingkungan Hidup Melalui Pola Pembangunan Kota Di Surakarta. *Gema*, 27(50), 61317.
- Biyan Shandy. (2015). *Urbanisasi, Tantangan Kota Surabaya*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/shandybee/56791a9fb49373ec0673fca8/urbanisasi-tantangan-kota-surabaya>
- Fahmi, I. (2014). Studi Kelayakan Bisnis dan Keputusan Investasi. *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Irhamyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), 45–54.
- Nasution, M. D. K. (2020). *Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Dalam Menentukan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan*.
- Obot, F., & Setyawan, D. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3).
- Peraturan Presiden. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, D. P., Klara, A., Damanik, D., Faried, A. I., Lie, D., Fazira, N., & Rozaini, N. (2021). *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Ravazzoli, E., & Torricelli, G. P. (2017). Urban mobility and public space. A challenge for the sustainable liveable city of the future. *The Journal of Public Space*, 2(2), 37–50.
- Rozikin, M. (2012). Analisis pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Batu. *Jurnal Review Politik*, 2(2), 219–243.
- Styowati, E. S. (2013). *Penyediaan Lahan untuk Antisipasi Urbanisasi di Kota Surabaya*. Kompasiana.Com. https://www.kompasiana.com/eka_sulis/5528f85bf17e61ce228b45c7/penyediaan-lahan-untuk-antisipasi-urbanisasi-di-kota-surabaya
- Sugiartha, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2020). Tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah Bali. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 96–102.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Trifita, A., & Amaliyah, R. (2020). Ruang publik dan kota berkelanjutan: strategi pemerintah Kota Surabaya mencapai Sustainable Development Goals (sdgs). *Global & Policy*, 8(2), 159–174.
- Zaini, M., & Darmawanto, A. T. (2015). Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 15(2).